

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENGATASI ABRASI
(Studi di Pantai **Muntai** Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ADE DWI PUTRA
147310447

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ade Dwi Putra
NPM : 147310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Sarjana Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 9 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



Rizky Setiawan S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui
Perogram Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ade Dwi Putra
NPM : 147310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Serata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat gune memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 9 April 2019


Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si
Anggota


Dr. H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

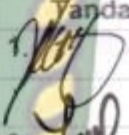
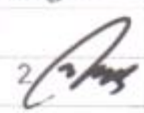



=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 303/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Maret 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ade Dwi Putra
NPM : 147310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Nilai Ujian : Angka : " 77,8 " ; Huruf : " B + "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Raul, M.Si.	Anggota	4. X
5.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 28 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 303/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ade Dwi Putra
N P M	: 147310447
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrasi (Studi Di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Andriyus, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Rijalul Fikri, S.Sos., MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Maret 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ade Dwi Putra
NPM : 147310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Serata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan Dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 April 2019

An. Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Muliarto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan KaruniaNya sampai saatini penulis masih diberikan kesehatan Dan semangat yang luar biasa sehingga berhasil untuk menyelesaikan Penulisan Usulan penelitian ini, Yang berjudul “peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Abrasi(Studi di pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).”

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan Usulan Penelitian ini tidak dapat berjalan dengan baik. Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril dan mateil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pada Kesempatan ini, Perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando,S.Ip.M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Sebagai Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Sebagai Dosen Pembimbing II Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arah kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
6. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memebrikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada Penulis selama Mengikuti Pendidikan pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmus Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin Penelitian dan Pengambilan data serta Memberikan Informasi Kepada Penulis Terkait dengan Penelitian Ini.
9. Kepada Masyarakat Desa Muntai yang telah Memberikan Informasi Dan Bersedia diwawancara Terkait Penelitian Ini.
10. Termakasi Kepada Ibunda Sutarmi Dan Ayahanda Alm. Syofyan dan Kakak Putri Ayu Perdana dan seluruh keluarga Tercinta Atas Kerja Keras Doa restu Yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan Semangat, Motivasi dan Limpahan Kasih sayaang yang tiada henti.

11. Buat Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan Baik Dalam Menuntut Ilmu Maupun Seperantauan yang banyak memotivai dan memberi semangat dalam perjuangan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT, dan semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis mau pun pembaca Sekalian, Amin.

Pekanbaru, 20 Maret 2019
Penulis

ADE DWI PUTRA



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Peranan.....	12
3. Konsep Kebijakan	18
4. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	20
5. Teori Abrasi	22
6. Teori Pembangunan	23
7. Teori Perbaikan.....	24
8. Teori Pencegahan.....	24
9. Teori Pemeliharaan	25
B. Kerangka Pikir.....	26
C. Konsep Operasional	27
D. Operasionalisasi Variabel.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Keyformen dan Informen	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	34
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis	35
1. Gambaran Umum	35
2. Sosial Budaya.....	38

3. Visi dan Misi kabupaten Bengkalis 2016-2021	40
B. Gambaran Umum Desa Muntai.....	41
1. Prasasti	42
2. Penghasilan Masyarakat Desa Muntai	43
3. Hubungan Sosial Kemasyarakatan Desa Muntai	44
4. Pemerintahan Desa Muntai	45
C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	45
1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.....	45
2. Fungsi dan Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Bagian Sumber Daya Air Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kendudukan,Susunan Organisasi, Eselohening, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	48
3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	52
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN	
A. Identitas Responden	54
1. Tingkat Usia Responden	54
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	55
3. Jenis Kelamin Responden	55
B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi(Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	56
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi.....	73
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	79
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
I.1	Batas Wilayah Kabupaten Bengkalis	8
I.2	Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 206	8
1.3	Kegiatan Lanjutan Pembangunan Turap dan Pemecah Gelombang Pengaman Pantai diwilayah Kecamatan Bantan Tahun 206.....	10
II.I	Oprasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Muntai Kabupaten Bengkalis).....	30
III.2	Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Muntai Kabupaten Bengkalis).....	34
IV.1	Data Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016	39
V.1	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia	56
V.2	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
V.3	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1	Kerangka Pikir dari Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi di pantai Muntai Kecamatan bantan kabupaten Bengkalis.....	28
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	48



**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENGATASI ABRASI
(Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.)**

ABSTRAK

ADE DWI PUTRA

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir yang dapat juga mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang yang mengakibatkan daratan semakin terkikis dan lautan makin meluas, tentu hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat khususnya yang tinggal ditepian pantai karena akibat dari abrasi ini hilangnya lahan pertanian kebun-kebun hingga tempat tinggal masyarakat. Jika hal ini terus terjadi maka tidak dipungkiri bisa menyebabkan hilangnya sebuah pulau hal ini lah yang seharusnya termasuk dalam perhatian pemerintah, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Masalah Abrasi Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Di dalam penelitian ini yang menjadi keyforman adalah kepala seksi perencanaan teknis bidang sumber daya air, staf bidang sumber daya air, staf seksi sungai pantai dan danau, dan informen dalam penelitian ini adalah masyarakat desa muntai yang tinggal didekat pantai muntai ini. Ada pun jenis dan sumber data adalah primer dan skunder yaitu data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan hasil wawancara dan selanjutnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data deskriptif dengan tipe penelitian ini adalah observasi yaitu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran secara riil. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Mengatasi Abrsi Studi di Panntai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ini masih perlu perhatian lebih dan ditingkatkan lagi prioritas terhadap masalah abrasi ini mengingat dampaknya yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan luas wilayah daerah itu sendiri.

Kata Kunci : Peranan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Abrasi.

**ROLE OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORK AND SPACE
ADMINISTRATION OF BENGKALIS DISTRICT IN OVERCOMING
ABRASI**

(Study at Muntai Beach, Bantan District, Bengkalis Regency.)

ABSTRACT

ADE DWI PUTRA

Abrasion is one of the problems that threatens the condition of the coast that can also threaten the coastline so that it retreats backward which causes the land to be eroded further and the sea expands, of course this is very dangerous for the people, especially those living on the coast because of the abrasion loss gardens to people's dwellings. If this keeps happening then it is undeniable that it can cause the loss of an island. This should be included in the government's attention. The main issue in this research is how the Role of the Public Works Department and Spatial Planning of Bengkalis Regency in Overcoming Abrasion Problems in Muntai Beach, Bantan District Bengkalis. In this study the keyformants were the head of the technical planning section in the field of water resources, water resources staff, coastal and lake river section staff, and informants in the research were muntai villagers who lived near the muntai beach. There are also types and sources of data are primary and secondary, namely data obtained from respondents through data collection and interview results, and then this study uses qualitative methods and descriptive data with this type of research is observation, namely activities to obtain information needed to present a real picture. From the results of this study, it can be concluded that the Department of Public Works and Spatial Planning of Bengkalis Regency in Overcoming Abrasi Studies in the Muntai District of Bantan District, Bengkalis Regency still needs more attention and increased priority over this abrasion problem considering the very harmful effects on the community and the area. the area it self.

Keywords: *Role, Office of Public Works and Spatial Planning of Bengkalis Regency, Abrasion.*

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Dwi Putra
NPM : 147310447
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi (studi dipantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Maret 2019

Pelaku Pernyataan



ADE DWI PUTRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia IV yang meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan dan memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, maka dibentuklah sebuah Negara untuk mensejahterakan rakyatnya yang berarti bahwa Negara wajib melayani warga negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diperlukan adanya suatu pelayanan.

Pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional, dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggaraan Negara yaitu pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintah desa. Tingkat pemerintahan ini merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan

pemerintah pusat didukung dengan keberhasilan pemerintahan daerah dan begitu juga sebaliknya. Semua memiliki tugas dan peranan yang membawa arah pembangunan kita kearah yang lebih baik.

Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 dimana dalam Undang-Undang Dasar tersebut dijelaskan tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomiseluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan urusan pemerintah, menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Dengan hadirnya undnag-undnag yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini maka telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi disetiap daerah.

Adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka dalam mengurus pemerintahannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (2) dijelaskan bahwa :

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;**
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Menurut perpres Nomor 51 Tahun 2016 Pantai adalah daerah antar muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Pantai adalah suatu barisan sedimen atau endapan yang muncul mulai dari garis air terendah sampai ke tebing atau sampai ke zona dengan tumbuhan permanen. Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri.

Kondisi kawasan pantai diberbagai lokasi diindonesia sangat mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya kejadian abrasi. Abrasi adalah peroses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Penyebab abrasi karena factor alam dan atau factor manusia. Proses terjadinya abrasi karena factor alam disebabkan

oleh angin yang bertiup diatas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Sedangkan factor manusia misalnya kegiatan penambangan pasir, kegiatan reklamasi.(kodotie 2010;329). Sekitar 100 lokasi di 17 provinsi dengan panjang pantai kurang lebih 400 Km telah mengalami erosi pantai yang mengkhawatirkan. Jumlah catatan kejadian bencana abrasi di Indonesia mulai dari tahun 1815 samapai dengan 2013 adalah sebanyak 192 kali.

Selain merusak lingkungan mengganggu ketentraman dan kehidupan masyarakat. Abrasi juga mengancam kedaulatan Negara karena batas terluar negara terletak dipantai yakni 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat maka apa bila abrasi Mengikis pantai maka berkurang pula luas wilayah Negara. Karna itu Abrasi ini cukup menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas sempadan Pantai. Pada Pasal 9 ayat (2) poin (b) abrasi termasuk sebagai ancaman Batas Sempadan Pantai:

b. Keberadaan faktor ancaman:

1. Gempa;
2. Tsunami;
3. Erosi dan abrasi;
4. Badai; dan
5. Banjir dari laut.

Dalam pelaksanaannya, penanganan masalah abrasi pantai dan gelombang ekstrim dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman pola penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan biaya, operasional dan pemeliharaan Selain kerjasama, pembagian kewenangan penanganan abrasi dan gelombang ekstrim di

daerah pantai juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengendalian abrasi. Eksploitasi sumberdaya laut dan pesisir Kabupaten Bengkalis saat ini telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang cukup memprihatinkan seperti pertambangan pasir ilegal dan pencurian mangrove.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaen Bengkalis. Bagian Ketiga Bidang Sumber Daya Air Pasal 12 mengenai Tugas dan Fungsi Seksi Sungai, Pantai dan Danau :

- (1) Seksi Sungai, Pantai dan Danau mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai sungai, pantai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Merencanakan program kegiatan pertaghun anggaran seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sungai, Pantai dan Danau secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Sungai, Pantai dan Danau secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan disposisi atasan atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melakukan konservasi Bidang Sumber Daya Air;
- k. Melakukan pengelola, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan prasarana air baku;
- l. **Melakukan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi, pada sungai, pantau dan danau;**
- m. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, waduk dan danau;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Sungai, Pantai dan Danau;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sungai, Pantai dan Danau kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Dari Peraturan Bupati diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah abrasi dipantai muntai kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pantai muntai terletak didesa Muntai Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Desa muntai sendiri memiliki luas 22Km² dengan jumlah warga 1854 jiwa dengan 542kk. Mayoritas pekerjaan warga didesa ini adalah nelayan dan

petani karet dan kelapa. Karena pantai muntai ini terletak di sebelah utara Kabupaten Bengkalis yang berhadapan langsung dengan selat Malaka kondisi pantai muntai termasuk terparah terkena abrasi pantai di wilayah Kabupaten Bengkalis laju abrasi di pantai ini $\pm 5-6$ meter pertahunnya, abrasi ini sudah meresahkan warga sekitar karena sudah banyak kebun karet dan kelapa warga yang terletak ditepian pantai tergerus ombak kelaut, bahkan abrasi ini sudah mengancam tempat tinggal warga yang tinggal didekat pantai, maka dari itu perlu adanya penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengatasi masalah abrasi ini yang tiap tahun meningkat.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km² dengan jumlah penduduk 639.463 jiwa.. Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau.

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 Pulau besar dan kecil. Beberapa di antara pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²) dan Pulau Bengkalis

(938,40 km²). Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur Pulau Sumatera yang mencakup area seluas 7.793,93 Km² dengan batas sebagai berikut:

Dari tahun ke tahun wilayah pesisir Kabupaten Bengkalis mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama yang berhadapan langsung dengan selat Melaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat. di Pantai Berdasarkan Pusat Penelitian dan Analisis Abrasi Pantai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Kerusakan pantai akibat abrasi dapat dicegah dengan 3 cara:

1. Secara alami, melalui penanaman bakau atau tanaman jenis lain.
2. Bangunan penahan gelombang atau turap.
3. Merubah prilaku kehidupan masyarakat sekitar pantai. Kegiatan - kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Metode yang digunakan untuk menanggulangi abrasi pantai adalah dengan menggunakan struktur penahan gelombang, dimana struktur tersebut berfungsi sebagai peredam energy gelombang pada area tertentu. Hantaman gelombang yang besar dan terus menerus dapat diredam dengan cara mengurangi energy gelombang, sehingga energy gelombang yang mengenai pantai yang menjadi lebih kecil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan struktur pemecah gelombang yang berfungsi untuk memecahkan, merefleksi dan mentranmisi energy gelombang.

Kecamatan Bantan merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis Berdasarkan data dari Kantor Camat Bantan, luas wilayah kecamatan

Bantan adalah 424 km², dimana desa terluas adalah Teluk Pambang dengan luas 114 km² atau 26,89% dari luas keseluruhan kecamatan Bantan, diikuti oleh desa Selat Baru 63 km² (14,86%) dan Bantan Tengah 51 km² (12,03%). Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Bantan adalah desa Teluk Lancar dengan jarak lurus 37 km. Dan jarak terdekat adalah desa Selat Baru sebagai ibukota kecamatan Bantan.

Pantai muntai terletak didesa Muntai Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis. Desa muntai sendiri memiliki luas 22Km² dengan jumlah warga 1854 jiwa dengan 542kk. Mayoritas pekerjaan warga didesa ini adalah nelayan dan petani karet dan kelapa. Karena pantai muntai ini terletak di sebelah utara Kabupaten Bengkalis yang berhadapan langsung dengan selat malaka kondisi pantai muntai termasuk terparah terkena abrasi pantai diwilayah Kabupaten Bengkalis laju abrasi di pantai ini ±5-6 meter pertahunya. Abrasi ini sudah meresahkan warga sekitar karena sudah banyak kebun karet dan kelapa warga yang terletak ditepian pantai tergerus ombak kelaut, bahkan abrasi ini sudah mengancam tempat tinggal warga yang tinggal didekat pantai, maka dari itu perlu adanya penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengatsi masalah abrasi ini yang tiap tahun meningkat. Selain karena faktor alam faktor manusia juga menjadi salah satu penyebab abrasi ini, seperti Penambangan pasir ilegal dan pengambilan kayu mangrove yang sangat berlebihan, hal-hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat yang tidak tau akan dampaknya, sehingga hal-hal tersebutlah yang menyebabkan semakin cepatnya abrasi disaerah ini

Berikut ini adalah pengeluaran anggaran Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan penahan gelombang pantai Di kabupaten Bengkalis :

Tabel 1.4 Kegiatan lanjutan pembangunan turap penahan gelombang dan pengaman pantai di kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis 2016

No	Desa	Uraian Pelaksana Program	Jumlah anggaran (Rp)	Panjang Pembangunan pengaman pantai
1	Jangkang	Pembangunan turap pemecah gelombang kuala penampar	2.000.000.000	83,3 meter
2	Selatbaru	Lanjutan pembangunan turap kontruksi penahan gelombang dipantai indah selat baru	5.000.000.000	208,3 meter
3	Batanair	Lanjutan pembangunan pengaman pantai	1.283.757.000	53,4 meter
4	Muntai	Lanjutana pembangunan pengaman pantai	2.242.045.500	93,4 meter
5	Pambang	Lanjutan pembangunan pengaman pantai	2.242.045.500	93,4 meter
		Total	12.768.667.000	531,8 meter

Sumber : dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkalis.

Dari uraian diatas fenomena maslah abrasi menyebabkan terjadinya fenomena social dan permasalahan dalam masyarakat seperti hilangnya lahan pertanian masyarakat, rusaknya infrasturktur bangunan yang ada digaris pantai bahkan kritisnya bisa menenggelamkan sebuah pulau. Maka fenomena yang dapat dilihat dari keterangan diatas yaitu:

Maka dapat fenomena yang dapat dilihat dari keterangan diatas yaitu:

1. Pembangunan dalam mengatasi abrasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis belum maksimal.
2. Pengalokasian anggaran pada program penanganan abrasi Pantai Muntai belum menjadi prioritas padahal kondisinya sudah sangat mengawatirkan.

Dari Permasalahan di atas, diketahui bahwa fenomena yang mendominasi yaitu pada Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi abrasi di Pantai-Pantai Kabupaten Bengkalis dan Studi kasusnya di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka penulis Berkeinginan melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)”**.

B. Rumusan Masalaah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diatas, saya selaku peneliti merumuskan maslah yaitu Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi Di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupatenn Bengkalis).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan dilaksanakanya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi masalah abrasi di Pantai Muntai kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
 - b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi abrasi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
2. Kegunaan Penelitian.
- a. Memberikan masukan atau informasi kepada Dinas pekerjaan Umum dan Penata ruang Dalam Mengatasi Abrasi Di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai Peranan diinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Dalam Mengatasi Abrasi Di Pantai Muntai kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
 - c. Sebagai tambahan ilmu Pengetahuan bagi Penulis khususnya dan para Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik lainnya.

Kerangka teori atau studi kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran aatau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan adlah teori-teori mengenai variable permasalahan yang akana diteliti. Mardalis (200;4).

1. Konsep Pemerintahan

Kata Pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsure pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal, Syafiie dan Azikin,(2008;15).

Pemerintah dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin gobernate, greek gibernen yang berarti mengemudikan, atau

mengendalikan. Menurut Awang dan Wijaya (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat menurut adat dan isitiadat, institusi dalam sebuah Negara.

Pemerintah adalah organ yang selalu berwenang memperoses layan publik dan memperoses layanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat menerimannya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Ndraha (2003;6)

Menurut Syafie dan Azikin (dalam rahman, 2009;2) pemerintahan adalah sekelompok orang tertentu yang seccara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antara deparetemen dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri, Strong mengatakan bahwa pemeribtah adlam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karna itu pemerintah harus :

1. Harus mempunyai kekuassan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
2. Harus mempunyai kekuatan leglislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang.
3. Harus mempunyai kekuasaan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menjalankan peraturan, hal tersebut dalam menyelenggarakan keperntingan Negara.

C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” menjelaskan tentang pengertian pemerintahan sebagai berikut:
 “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk

memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, (1) harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. (2) harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. (3) harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara". (Syafie, 1998: 4-5)

Ndraha (2003;5) mempunyaia pendapat pemerintah adalah sebuah sistem multiperoses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Ndarah juga mekatakan pemerintah terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan atau proses penyediaan dan distribusi pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, pelaku kegiatan itulah yang disebut sengan perintah.

Menurut Wilson (dalama Syafiie dan Andi Azikin, 2008,9) Pemerintah dalam akhir urainya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata.

Menurut Napitupulu (2007;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau Organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintah adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Kemudian di dalam Al-uran juga dijelaskan denagn memiliki definisi terhadap pengertian pemerintahan yang terdapat pada surat ke 3 ayat 04 dimana

mengajak kebaikan, mengajak pada kebenaran, Melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung (dalam Sayfiie dan Azikin, 2008;0).

Dalam bahasa inggris , Pemerintah disebut government (latin gubernare, Greek kybernan, artinya to steer, mengemudiakan atau mengendalikan) sehingga semula, lambang pemeritahan itu berbentuk kemudi kapal. Ndraha (1997;7)

Adapun tugas dari pemerintah menurut Atmosudirdjo (dalam syafiie, 2011;9) antara lain adalah suatu tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan pengadilan.

Sedangkan menurut Nugroho (2003;75) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat 3 jenis tugas pokok yang diperlukan agar amsyarakat hidup, tumbuh dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

1. Tugas pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tugas membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahtraan ekonomi dari amsyarakat.
3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Rasyid (dalam labolo, 2006;22) membagi fungsi pemerintah menjadi 4 bagain yaitu pelayanan (public servic), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan peraturan (regulation).

2. Konsep Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989).

Sedangkan menurut Rivai (2004:48) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000:304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009: 213).

Levinson (dalam Soekanto, 2009: 213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton (dalam Raho, 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh karena menduduki status-status sosial khusus.

Selanjutnya Susanto menjelaskan (dalam Soekanto 2001:194) bahwa dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peran. Peranan adalah dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun biwa di sebut status objektif.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan *kedua* harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Menurut Ndraha (2003;53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintah. Perkembangan suatu pemerintahan mengikuti

perkembangan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Pemerintah dibentuk oleh masyarakat, pemerintah berperan dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah tersebut akan menciptakan ketertiban dan ketentraman penyelenggaraan pemerintahan dimasyarakat.

Peran dan fungsi pemerintah dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual, pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan yaitu menetapkan kebijakan umum dan melaksanakannya.

Menurut Miftah Toha (2012:10) peran timbul karena seseorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan, yang setiap saat ia perlu untuk berinteraksi. Lingkungan ini luas dan beraneka macam. Dan saat masing-masing manajer mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Baik manajer tingkat atas, tengah maupun bawah akan mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu sedikit berbeda.

Sohardono (2004:10) mengatakan bahwa sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjuk para perilaku yang mengandung keharusan (oughtness, shoidness) untuk

dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (convert) disebut sebagai norma yang sedang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (demand).

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (pasolong, 2008;92).

Sebagai konsep publik, makna kebijakan (policy) yang senantiasa berubah menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan dalam praktik kebijakan. Di Inggris Policy mengandung makna yang kompleks dan beragam. Dalam karya Shakespeare, misalnya kita akan menjumpai empat makna yang berbeda, yaitu kehati-hatian, sebetuk pemerintahan, tugas, dan administrasi.

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rencana besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Kebijakan dalam Kybernologi dan dalam Kebijakan Pemerintahan (Ndraha, 2011: 493), adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

Menurut Anderson (dalam indihono, 2009;7) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidadng kegiatan tertentu.

Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan memperoleh keputusan pemerintah (Sumaryadi, 203:83)

Winarno (2012: 19) dan Wahab (2010: 1-2) sepakat mengatakan bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design (dalam Ali dan Imam, 2015: 4).

Carl Fried memandang kebijakan sebagai sauatn arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (dalam Winarno, 2014: 20-21).

Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat

secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (dalam Suharto, 2010:7).

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (policy) itu sendiri berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Suharto (2010: 7), Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2007;268) manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut:

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (organisasi)
- c. Staffing (kepegawaian)
- d. Motivating (motivasi)
- e. Controlling (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pembuat keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-undang Dasar 1994 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekanto (1986;70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi:

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, dimana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

5. Pantai

Menurut perpres Nomor 51 Tahun 2016 Pantai adalah daerah antar muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Pantai merupakan bagian daratan yang terdekat dengan laut. Garis pantai adalah garis batas antara laut

dengan darat. Pesisir adalah bagian daratan yang tergenang oleh air laut ketika pasang naik dan kering ketika pasang surut wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut (shore) yang meluas ke arah daratan hingga batas pengaruh marin masih dirasakan (Bird, 1969 dalam Sutikno, 67;1999). Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Dimana daerah daratan adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya. Triadmodjo(172 ;1999).

Menurut Sandy (1996), pantai adalah muka bumi yang merupakan garis khayal tempat bertemunya daratan dan perairan, dari muka air laut rata – rata terendah sampai muka air tertinggi. Secara fisiologis pantai didefinisikan sebagai wilayah garis pantai hingga ke arah yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas yang kadang materinya berupakerikil (Sugandi, 10;1992).

6. Abrasi

Abrasi adalah proses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Penyebab abrasi karena faktor alam dan atau faktor manusia. Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup diatas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut mempunyai kekuatan untuk mengikis

daerah pantai. Sedangkan faktor manusia misalnya kegiatan penambangan pasir dan reklamasi. Kodotie (2010;329).

Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai, dan juga mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lainya. Triatmojo (1999;397).

7. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” serta akhiran “an”. “Cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan penolakan”,(Menurut KBBI: 2007) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Sedangkan pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data/keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan/penelitian epidemiologi (Nasry, 70;2006).

Pencegahan berarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian,kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145). Menurut Yunita (dalam L.Abate,

1990:10) pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu atau kelompok.

8. Pembangunan

Menurut Coralie Bayent dan Louise White (dalam Ndraha, 1990: 15-16) pembangunan adalah upaya yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individual maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti menolong pemerataan nilai dan kesejahteraan (equality).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan bersama. Kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
4. Pembangunan berarti mengakibatkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

Menurut Ndraha (2004: 134) pembangunan pemerintahan adalah pembangunan kemampuan pemerintahan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah jasa publik layanan civil.

9. Perbaikan

Vincent Gasper , perbaikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem produksi sehingga dari sistem itu dapat diharapkan menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki . Sistem perbaikan dapat dipandang sebagai bayangan dari sistem produksi , dimana apabila sistem produksi beroperasi dengan kapasitas yang sangat tinggi maka akan lebih intensif . (Vincent Gasper , 94 , Hal ; 513)

Menurut Higgs & Mobley, Perawatan/pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Maintenance atau pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga agar peralatan tetap berada dalam kondisi yang dapat diterima oleh penggunaannya.

10. Pemeliharaan

Dalam pemeliharaan, penganggaran juga menjadi salah satu factor utama suksesnya suatu pembangunan baik dalam situasi normal maupun darurat (Kodotie, 2010: 64-65).

Pemeliharaan perasana sumber daya air terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi perasana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Kodotie (2010;179).

Menurut Petrick (2001:407). Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya, sampai pada suatu kondisi yang bisa diterima.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran dari Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi yaitu:

Gambar II.1



Sumber : Modifikasi Penulis tahun 2018

C. Konsep Operasional

Untuk member pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui konsep operasional sebagai berikut:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang hasilnya akan dilihat untuk memenuhi tujuan.
2. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian daya rusak air.
3. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
4. Pembangunan adalah upaya pencegah abrasi yang dilakukan dengan bangunan turap.
5. Pengelolaan adalah kerja sama yang dilakukan dengan dinas tersebut.
6. Pengendalian adalah keputusan yang dilakukan untuk mengawasi
7. pembangunan turap supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan.
8. Pemeliharaan adalah menjaga lingkungan dengan memberikan peran masyarakat didalamnya.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.I : Operasional variabel Penelitian Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi Di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kekuatan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut merupakan peran (Soerjono Soekanto, 2002: 237)	Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)	1. Pembangunan 2. Pebaikan 3. Pencegahan 4. Pemeliharaan	a.Pembangunan infrastruktur b.Pemerataan pembangunan a. Rehabilitasi hutan mangrove dengan dinas kehutanan b.Kelayakan bangunan turap sesuai fungsi turap sebagai penahan gelombang a. Pengawasan pembangunan turap b. Pencegahan penebangan hutan mangrove dan galian pasir a. Pencegahan kerusakan dan penurunan fungsi b. menjaga kekuatan ketahanan bangunan turap

Sumber: modifikasi penulis tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan data deskriptif. Tipe penelitian ini adalah observasi yaitu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut, Sujerweni (2014:32)

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dimana melihat kondisi alam yang terjadi, abrasi merupakan ancaman yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat yang tinggal dipesisir pesisir pulau Bengkalis khususnya di Pantai Muntai yang seharusnya termasuk menjadi perhatian utama Pemerintah daerah. Maka dari itu penulis mengambil masalah abrasi tersebut.

C. Keyinforman dan informan

Key informan dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Staf Bidang Sumber Daya Air dan Staf Seksi Sungai Pantai dan Danau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Informan dalam penelitian ini adalah :

- Bapak wisnu ketua RT 03 RW 02 Desa Muntai
- Bapak Yusri profesi Nelayan Masyarakat asli Desa Muntai
- Ibu Tuti Hasnah Warga Desa Muntai yang tinggal di tepian Pantai Muntai

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengambilan data dan wawancara yang didapat. Data primer yang dimaksud adalah tentang peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi abrasi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari:

1. Gambaran rancangan pembangunan struktur pemecah gelombang
2. Uraian Tugas dan Fungsi
3. Proposal Bidang Sumber Daya Air
4. Dan Lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini :

1. Wawancara (interview) yaitu melakukan dialog secara mendalam atau percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung

dari responden guna melengkapi data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam kebutuhan penelitian ini.

2. Observasi atau pengamatan langsung ketempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi tempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah beserta fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.

Setalah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokan dalam masing variable beserta indikatornya. Kemudian data dianalisis secara kualitatif yang dilengkapi dengan data.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian ini berlangsung didesa tanjung balam kecamatan siak hulu kabupaten Kampar. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini.

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Muntai Kabupaten Bengkalis)

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																				
		Jan-feb (2018)				Maret				Juni				Juli-Des				Jan-Feb (2019)				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Persiapan dan penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Kuisisioner																					
5.	Rekomendasi survey																					
6.	Survei Lapangan																					
7.	Pengolahan dan analisis data																					
8.	Penyusunan laporan hasil penelitian (Skripsi)																					
9.	Konsultasi Bimbingan skripsi																					
10.	Ujian Skripsi																					
11.	Revisi Skripsi																					
12.	Penggandaan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH SINGKAT KABUPATEN BENGKALIS

1. Gambaran Umum

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasi sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri – Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh

melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena air mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

Table V1.I : Data Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA DAN KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK
1	BANTAN	23	424,40 Km ²	44.563
2	BENGKALIS	31	514,00 Km ²	92.333
3	BUKIT BATU	17	1.128,00 Km ²	38.177
4	MANDAU	24	937,47 Km ²	275.772
5	RUPAT	16	1.524,85 Km ²	37.401
6	RUPAT UTARA	8	628,50 Km ²	16.572
7	PINGGIR	19	2.503,00 Km ²	110.589
8	SIKIL KECIL	17	742,21 Km ²	24.056
	JUMLAH	155	7.793,93 km ²	639.463

Sumber : Badan pusat Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2017

2. Sosial Budaya

Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru saja berkembang. Namun secara historis Bengkalis pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua walaupun banyak diantaranya sudah punah maupun tidak utuh lagi. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa terutama Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk minoritas.

Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan dalam kesehariannya identik dengan budaya Islam. Upacara-upacara tradisionalnya cenderung dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu disebutkan bahwa "Melayu adalah Islam, apabila tidak Islam berarti tidak Melayu".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau

Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1645, Bengkalis hanya merupakan kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678, daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab

yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang banyak ditangkap oleh orang-orang Selat.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Saat didirikannya Kerajaan Siak tersebut Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat serta membuat kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Selanjutnya, saat Bengkalis berada pada kekuasaan Belanda, Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun demikian, Belanda

kemudian memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sesudah perpindahan tersebut Bengkalis dijadikan ibukota Afdeling Bengkalis sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun.

Sementara itu, perjuangan masyarakat Bengkalis untuk mempertahankan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Belanda berhasil menduduki Bengkalis kembali pada tanggal 30 Desember 1948. Pada saat itu, Belanda mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat Bengkalis.

3. VISI DAN MISI KABUPATEN BENGKALIS 2016 - 2021

a. VISI:

1. TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA

b. MISI:

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni:

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun.
2. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
3. Gerbang Permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan.
4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

B. Gambaran Umum Desa Muntai

Pantai muntai terletak disesa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Muntai terletak dibagian timur Pulau Bengkalis merupakan sebuah desa atau kampung yang aman dan permai, berhadapan dengan selat malaka. Pulau Bengkalis adalah termasuk dalam daerah Provinsi Riau. Pulau Bengkalis secara keseluruhan lebih dikenal orang dengan Tanjung Jati. Begitu juga dengan

Desa Muntai, Jika dilihat dalam peta Indonesia nama Tanjung Parit lebih dikenal orang dari pada nama Muntai itu sendiri.

Ditinjau dari sudut geografi maka tanjung Jati yang terletak di Ujung Pulau Bengkalis dan Tanjung Parit Muntai yang terletak dipangkal Pulau Bengkalis merupakan kawasan yang paling strategis sebagai tempat persinggahan para pelaut dan pengembara pada masa silam. Disamping itu kedua kawasan ini berhadapan dengan selat malaka atau semenanjung malaysia. Sehingga tidak heranlah suatu ketika dulu antara penduduk muntai atau Bengkalis secara keseluruhan, Siak dan Bantan dengan Penduduk Johor, Malaka dan Pahang saling berkunjung dan bahkan menetap membuat perkampungan dalam kawasan-kawasan ini.

Menurut keterangan sebahagian masyarakat yang menyimpan sejarah Riau dan orang yang hidup pada zaman penjajahan belanda dan jepang, Muntai merupakan tempat laluan dan simpanan senjata untuk kegunaan pahlawan Indonesia yang dimasukkan dari Singapura. Ini menunjukkan bahwa Muntai menyimpan 1001 misteri kenangan silam yang tidak ramai diketahui orang.

a. Prasasti

Di daerah Tanjung Parit Muntai didapat dua buah tugu, masing-masing peninggalan Belanda dan Jepang. Kehadiran dua tugu ini tidak ramai diketahui oleh penduduk, baru setelah mendaratnya helikopter di Tanjung Parit awal tahun Tujuh Puluhan (1971) penduduk Muntai mengetahui ada tugu atau prasasti yang

ditanam di Tanjung Parit. Satu lagi perkara misteri yang menjadi tanda tanya bagi penduduk yang masih belum terjawab sampai saat ini.

Setengah orang mengatakan bahwa di Muntai suatu ketika dulu merupakan tempat tinggal dan persinggahan orang asli. Jika di Jambi kita temui Prasasti Talang Tuo, maka di Muntai tempat terletaknya Prasasti Talang Mamak, Talang Mamak merupakan salah satu suku orang asli yang ada di Daerah Riau ini. Kebenaran tentang wujudnya prasasti yang mengalami erosi menyebabkan prasasti dan tugu-tugu yang disebutkan tadi telah hanyut ke laut.

Dari adanya tugu – tugu di atas tadi membuktikan bahwa Muntai merupakan tempat yang memiliki potensi besar serta memiliki khazana yang masih tersembunyi. Bahkan Haji Ibrahi Bin Haji Abu Bakar (Wafat 1969) pernah mengatakan “Bahwa Muntai pada masa akan datang akan menjadi Mutiara.

b. Penghasilan masyarakat Muntai.

Ketika kedatangan kelompok Melayu muar johor ke muntai, di tempat ini banyak di tumbuh oleh pokok suntai. Orang melayu yang tinggal di muntai beserta orang asli kebanyakannya sebagai nelayan, barulah setelah orang-orang melayu muar ini datang, buah suntai diolah menjadi inyak suntai untuk dipakai sendiri dan dijual. Setelah itu barulah di muntai di tanam pohon-pohon karet atau getah, pokok pinang (pada tahun 1933). Sekarang ini penghasilan pokok masyarakat muntai adalah getah atau karet dan kelapa.

c. Hubungan Sosial Kemasyarakatan

Antara orang melayu riau yang memang telah ada di muntai orang asli dan melayu johor mempunyai hubungan yang baik dan saling hormat menghormati. Tidak ada dalam sejarah menceritakan tentang terjadinya persengketaan diantara mereka, malah kehidupan mereka sangat harmonis.

Pada tahun 1928 atas pemikiran dan inisiatif lebay maun, Haji Ibrahim bin Abu bakar, biajen beserta kawan-kawannya yang lain, maka di dirikanlah sebuah surau yang bertempat di tepi sungai muntai (sekarang tanah kuburan). Pendirian surau ini dilaksanakan pada masa penghulu mat bujang. Setelah itu dilantiklah lebay maun sebagai imam pertama dimuntai ini. Baru pada tahun 1948 surau ini dinaikkan tarafnya sebagai masjid.

Rupanya perkembangan agama islam di muntai sedikit sebanyak mempengaruhi orang-orang asli pada zaman penghulu kamsar, seorang wanita asli bernama encah memeluk agama islam, kemudian diberi nama khadijah. Setelah itu diikuti oleh uli juga seorang wanita. Jelaslah bahwa hubungan diantara tiga suku yang ada dimuntai pada masa silam sangat baik. Namun begitu karena masyarakat orang asli kebanyakannya amat sukar menerima perubahan dan kemajuan. Sehingga mereka merasa terdesak dan pindah kesuka jadi setelah itu kesungai raya teluk pambang.

Orang asli selain ang telah menetap dimuntai ini juga ramai ang datang setelah itu seperti tok batin senerak yang datang dari sebauk. Gonyeh ang datang

dari selat morong di pulau rupat. Ramai lagi yang memang telah berdomisili di muntai seperti nontel, dogok, dol, todak, rendang, jidan dan lain-lain.

d. Pemerintah di Desa Muntai

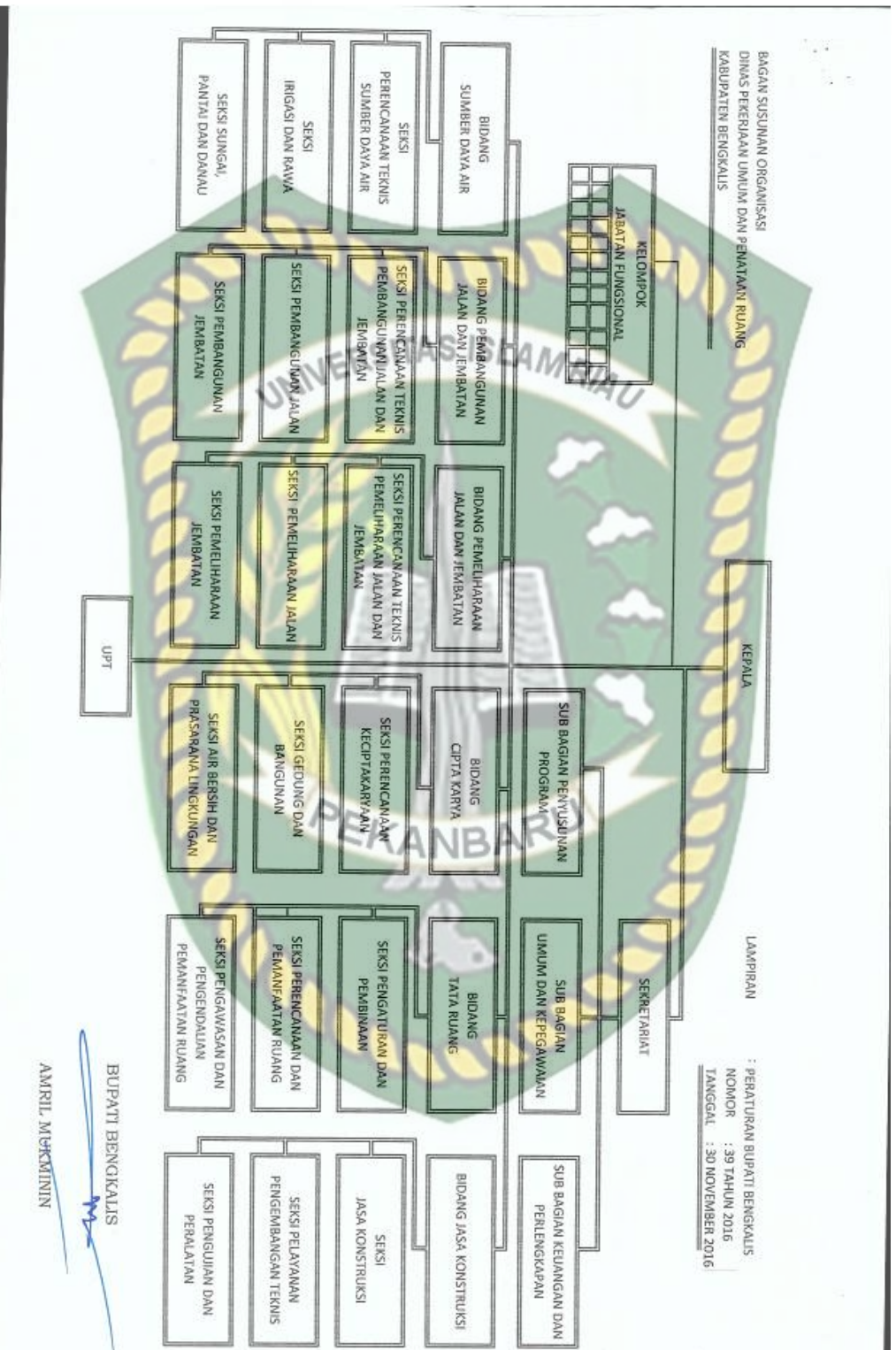
Pelaksanaan kepemimpinan di muntai ini dengan di pegang oleh seorang penghulu diperkirakan tahun 1885. Penghulu pertama, kedua dan ketiga merupakan orang melayu yang telah menetap di muntai. Sedangkan penghulu keempat, kelima hingga sekarang dipegang oleh melayu berketurunan dari muar johor.

1. Penghulu pertama, abu memerintah lebih kurang dari 1885 – 1910
2. Penghulu kedua, din bin abu dari 1910 – 1930
3. Penghulu ketiga, mat bujang dari tahun 1930 – 1938
4. Penghulu keempat, kamsar dari tahun 1938 – 1959
5. Penghulu kelima, nasroen bin haji umar dari tahun 1959 – 1989 (meninggal 1992)
6. Penghulu keenam, sabari bin haji mokkhtar jiman dari tahun 1990 hingga sekarang.

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

- 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.**

Gambar IV.I: Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2. Fungsi dan Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Bagian Sumber Daya Air Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaen Bengkalis.

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya air Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang sumber daya air.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan Tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
 - g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - h. Menginvestasikan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Menyelenggarakan perencanaan teknis irigasi, rawa, sungai, pantai, danau, air baku dan waduk;
- k. Melaksanakan pengelolaan hidrologi dan hidrometri;
- l. Memproses pemberian rekomendasi teknis untuk perizinan Bidang Sumber Daya Air dan Penentuan peil banjir;
- m. Melaksanakan kordinasi, pembinaa, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai abahan penyempurnaannya;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai irigasi dan rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (!) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Irigasi dan Rawa berdasar kan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
 - b. Memberi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Irigasi dan Rawa secara

rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginvestasikan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Irigasi dan Rawa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam pada daerah irigasi dan daerah rawa;
- k. Mengembangkan dan mengelola sistim irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- l. Melaksanakan kordinasi pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Seksi Irigasi dan Rawa berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air secara perodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Seksi Sungai, Pantai dan Danau mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis mengenai sungai, pantai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas tersebut pada ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Sungai, Pantai dan Danau secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Seksi Sungai, Pantai dan Danau secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan disposisi atasan atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Melakukan konservasi Bidang Sumber Daya Air;
- k. Melakukan pengelola, pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan prasarana air baku;
- l. Melakukan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir, abrasi, erosi, pada sungai, pantau dan danau;
- m. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana alam pada sungai, pantai, waduk dan danau;
- n. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan pada Seksi Sungai, Pantai dan Danau;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Sungai, Pantai dan Danau berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sungai, Pantai dan Danau kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

3. visi dan misi Dinas pekerjaan umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkalis

a. visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar eksis,antisipasif, dan inofatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut unruk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota didalam organisasi tersebut dapat memahami arah tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadar kolektif.

Dianatara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisis ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisis yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka dinas pekerjaan

umum dan penataan ruang kabupaten bengkalis menyatakan visi mereka sebagai berikut : “Terwujudnya Pembangunan Prasarana Dan Sarana Ke PUPR-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Niaga yang maju dan Unggul.” Penjelasan makna visi tersebut sebagai berikut:

Visi tersebut diatas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bengkalis sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasana dan Sarana yang berhasil guna dengan memprhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan Niaga yang maju dan Unggul.

b. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis maka dirumuskan misi mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a) Meewujudkanya Prasaran dan sara ke PUPR-an yang mampu memenuhi kebuuthan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh steakholder.

- b) Mewujukannya lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersediannya prasarana dan sarana dasar dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Misi adalah Sebagai berikut:

- a) Misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana fisik secara adil dan merata dengan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder serta bagaimana menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.
- b) Dengan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana diharapkan agar dapat memperhatikan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga sarana dan prasarana yang terdapat tidak mengganggu keberadaan lingkungan tapi justru saling mendukung antara sarana dan prasarana yang ada dengan lingkungan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini peneliti mencoba menjelaskan identitas dari responden yang telah ditentukan dan informasinya dapat diketahui melalui tahap wawancara sehingga dapat menjawab segala kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Adapun tahap responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Usia Responden

Berdasarkan tingkat usia responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

Tabel. V.1 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Responden	Tingkat Usia				Jumlah
		21-30	31-40	41-45	>45	
1	Kepala seksi pembangunan sarana pengairan	-	-	1	-	1
2	Staf bidang sumber daya air	2	1	-	-	3
3	Masyarakat	-	-	1	2	3
Jumlah		2	1	2	2	7

Dari tabel v.1 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki usia 41-45 1 orang, dan diatas 45 tahun 2 orang, sedangkan kepala seksi perencanaan teknis suber

daya air yang memiliki usia 41-45 Tahun 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki usia 21-30 Tahun 2 orang, 31-40 Tahun 1 orang.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tingkat pendidikan responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

Tabel. V.2 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Tingkat pendidikan				Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Serjana	
1	Kepala seksi pembangunan sarana pengairan	-	-	-	1	1
2	Staf bidang sumber daya air	-	-	-	3	3
3	Masyarakat	2	-	1	-	3
	Jumlah	2	-	1	4	7

Dari tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki Pendidikan SLTA 1 orang, dan SD 2 orang, sedangkan kepala seksi perencanaan teknis sumber daya air yang memiliki Tingkat Pendidikan Serjana 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki Tingkat Pendidikan Serjana 3 orang.

3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan jenis kelamin responden maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini sebagai informasi yang didapat dilapangan oleh peneliti untuk keyformen dan informenya sebagai berikut:

Tabel. V.3 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis kelamin		Jumlah
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala seksi pembangunan pengairan	-	1	1
2	Staf bidang sumber daya air	2	1	3
3	Masyarakat	2	1	3
	Jumlah	4	3	7

Dari tabel v.3 diatas dapat diketahui bahwa 7 orang responden tersebut sejumlah 3 responden terdiri dari masyarakat yang memiliki jenis kelamin laki-laki 2 orang dan 1 orang perempuan, sedangkan kepala seksi pembangunan sarana pengairan yang memiliki jenis kelamin perempuan 1 orang, dan Staf Sumber daya air yang memiliki jenis kelamin Laki-Laki 2 orang, Perempuan 1 orang.

B. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi abrasi (Studi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

Abrasi merupakan masalah yang sangat besar apa bila tidak ditangani dimana dampak dari terjadinya abrasi ini yaitu kerusakan sarana dan prasarana serta pulau akan semakin mengecil akibat abrasi pantai, kerusakan hutan bakau sepanjang pantai karena ombak begitu besar, terkikisnya daratan sehingga mengancam tempat tinggal masyarakat dan juga mata pencarian masyarakat seperti lahan kebun karet dan kelapa dan nelayan, adapun dampak yang begitu besar yaitu bisa menenggelamkan sebuah pulau. Namun dalam hal ini, sangat diperlukan perhatian pemerintah melalui program-program untuk mengatasi masalah abrasi

namun hal ini bukan hanya tugas pemerintah namun hal ini juga tugas masyarakat untuk menjaga lingkungannya mengingat banyaknya terjadi penebangan bakau secara liar.

Adapun masyarakat desa muntai dengan mata pencarian nealayan dan juga petani karet dan kelapa dan dari mereka masih banyak juga yang menebang pohon bakau dan tidak mengetahui apa itu abrasi dan dampak abrasi sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu. Dan dari sini bisa dilihat bahwasanya belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dengan penduduk desa muntai , sehingga abrasi yang makin meluas terus menerus terjadi.

Adapun untuk mengetahui peranan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten bengkalis dalam mengatasi abrasi (studi di pantai muntai kecamatan bantan kabupaten bengkalis) maka peneliti menggunakan beberapa indikator diantaranya:

1. Pembangunan

Pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi janji politik kepada rakyat,dari sisi rakyat. Pembangunan merupakan kebutuhan rakyat dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dan tujuan yang harus dicapai dlam rangka mensejahtrakan kehidupan rakyat.

Adapun tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pembangunan ini adalah:

- a. Melakukan perencanaan kegiatan yang mana perencanaan ini dilakukan dengan menunjuk staf yang diberikan tugas untuk terjun kelapangan, sehingga mendapatkan informasi untuk membenahi masalah yang ada dan juga untuk pengajuan proposal dibidang sumber daya air menyangkut masalah abrasi.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundangan-undangan kebijakan teknis, agar dalam melaksanakan kegiatan untuk melakukan perencanaan hingga pengevaluasi sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum.
- c. Mencari, mengumpulkan menghimpun, mensistemastikan dan mengelola data serta menganalisa data dan informasi yang merupakan hasil dari perencanaan yang telah dilakukan tadi, maka staf yang telah ditunjuk tersebut bisa langsung terjun kelapangan untuk mencari informasi dan data yang akurat, kemudian informasi dan data tersebut diolah sehingga ditemukan maalah yang harus diselesaikan.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Rosfina Arif, ST (Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air) beliau mengatakan:

“ tidak ada data tentang berapa kilometer garis abrasi dari pantai kedaratan , kalau dari kami (dinas) tidak mengukur jarak abrasi yang sangat luas itu tapi kalau untuk panjang garis abrasi yang terjadi sudah ratusan meter yang ambruk kelaut.” (Hari Rabu 3 Oktober 2018 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan :

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat bahwa dinas tidak memiliki data tentang berapa meter atau kilometer garis abrasi dari pantai kedaratan, dinas hanya memiliki panjang garis abrasi yang terjadi dipinggiran pantai hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengumpulan data dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam bidang sumber daya air ini tidak memiliki data yang cukup akurat sehingga informasi yang seharusnya dimiliki oleh dinas sebagai pedoman untuk mengukur berapa laju abrasi dari pantai kedaratan, sehingga dampak yang ditimbulkan akibat abrasi bisa menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan, namun jawaban sama yang peneliti terima dari responden tersebut bahwa dinas tidak memiliki data berapa jumlah tanah dan perkebunan warga yang telah terjun kelaut tersebut. Maka dari itu bisa kita lihat kurangnya data maupun informasi secara lengkap yang dimiliki oleh dinas pekerjaan umum bidang pengairan ini sehingga perencanaan didalam pembangunan hanyaq difokuskan kepada pembangunan seperti turap pengaman pantai dan pemecah gelombang saja, yang diperoleh oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumber daya air dan seharusnya dinas lebih memperhatikan lagi informasi dan data yang sehingga dapat membantu masyarakat bukan hanya melalui pembangunan seperti turap, melainkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meraskan dampak abrasi.

- d. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas bidang sumber daya air yakni pada seksi sungai pantai dan danau serta menyiapkan

bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah persiapan bahan ini dilakukan dengan cara mengimput data dengan mencari solusi akan masalah yang telah ada sehingga masalah abrasi ini bisa diatasi dengan segera mungkin.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Yusri (nelayan) beliau mengatakan:

“ saya sudah seumur hidup tinggal di desa muntai ini, namun sampai saat ini belum ada pembangunan yang efektif didaerah ini bahkan kebun saya dan warga sini sudah ratusan meter yang jatuh kelaut, bahkan dipantai adalah kebun karet dan kelapa milik masyarakat yang tinggal didekat sin bahkan kebun kelaa milik sya yang ada diinggir antai sudah 200an meter yang sudah habis. Kalau unutup penanaman pohon bakau juga dirasa belum maksimal masih setengah hati cuman ada acara tertentu atau ada pejabat saja baru ada penanaman bibit bakau dan hanaya sesekali ada orang dinas datang untuk meantau” (pada hari sabtu 6 oktober 2018 di Pantai Muntai Desa Muntai Kecamatan Bantan)

Maka dari hasil wawancara dengan bapak yusri selaku responden dapat disimpulkan bahwa :

Dalam masalah abrasi didaerah ini cukup parah yang dirasakan oleh masyarakat dan juga pembangunan dan tindakan dalam mengatasi masalah abrasi ini dirasa masih sangat minim. Maka dari itu perlu perhatian dari pemerintah secepatnya dalam mengatsi maslah abrasi yang mana didalam tugas dan fungsi yang dimiliki dinas pekerjaan umum dan pentaan ruang ini dibisang sumberdaya air dimana tugas tersebut untuk menyiapkan bahan dalam rangka memecahkan

masalah ini namun sudah bertahun tahun pantai muntai ini belum mendapatkan penanganan yang serius.

Dan juga diperlukannya menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Air dengan cara melakukan pembuatan proposal yang bertujuan meminta anggaran untuk proses pembangunan yang dalam hal ini digunakan untuk mengatasi abrasi dengan cara lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai yang diserahkan kepada kabupaten.

Dikarenakan kabupaten tidak memiliki dana yang cukup tinggi untuk pembangunan tersebut maka proposal ini diserahkan kepada pihak provinsi dengan tujuan mendapatkan bantuan dana dari provinsi.

Hasil waawancara Peneliti dengan Ibu Rosfina Arif, ST (Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air) beliau mengatakan:

“Sudah banyak proposal yang kami ajukan ke provinsi dan sudah banyak juga ditolak, karena melemahnya perwakilan dari kabupaten diprovinsi khususnya di dinas pakerjaan umum dan penataan ruang provinsi” (Hari Rabu 3 Oktober 2018 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Maka dapatt disimpulkan bahwa kurangnya hubungan daerah dengan provinsi.

f. mengumpulkan, mengklasifikasi, mengelola dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan dalam hal ini dimana saat perogram mengatasi abrasi yang yelah masuk keprovinsi kemudian perogram tersebut disetujui maka

selanjutnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan pelelangan proyek yang mana dalam hal ini bertujuan agar pembangunan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Dan dalam melakukan pembangunan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan Pengaman pantai ini.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rico Amri, ST (Staf Seksi Sungai Pantai dan Danau) :

“Untuk program mengatasi abrasi ini seperti pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pembangunan drenase dan gorong-gorong, pembangunan taluk beronjong, pembangua turap, tanggul dan talud sudah ada diberbagai daerah seperti dipantai selat baru, jangkang dan pantai muntai ini sudah dilakukan pembangunan tetapi sering kali cepat rusak dikarenakan kurangnya perawatan.”

(Pada hari Rabu 3 oktobere 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Maka kesimpulan dari wawancara diatas adalah sudah adanya tindakan nyata yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkalis dalam melakukan tugas dan fungsinya didalam melakukan pembangunan.

G. memantau pelaksanaan program kegiatan unit kerja melalui rapat dan laporan tertulis serta peninjauan dilapangan dan pengawasan didalam pemantauan kinerja

ini terdapat standar kegiatan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan.

h. menilai dana menelahi pelaksanaan pembangunan sarana pengairan untuk diajukan kepada atasan laporan yang terakait dengan proses pembangunan fisik diajukan kepada atasan laporan yang terkait dengan proses pembanguna fisik apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik.

Petugas pengawas jika melakukan pengawasan harus mengadakan laporan rutin agar pengerjaan proyek pembnagunan fisik, kemudian penilaian mengenai kualitas pengerjan proyek pembangunan fisik, kemudian penilain mengenai kualitas pengerjaan proyek pembanguna fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanag beserta pengawas terkait, turun langsung untuk melihat perkembangan pengerjaan proyek sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

Hail wawancara dengan ibu Rosfina Arif, ST (Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air)

“Untuk mendapatkan kualitas baik maka diperlukan anggran yang cukup besar untuk mendapatkan kualitas terbaik. Anggaran yang diperlukan cukup besar untuk mendapatkan kualitas terbaik sekitar Rp26.000.000 permeter itu merupakan anggran yang besar sekali sedangkan lajua barasi sangaat cepat dan panjangnya sudah puluhan kilo meter, bahkan bisa puluhan hingga ratusan triliun untuk membangun pengaman pantai didaerah muntai ini bahkan setiap

tahunya biaya ini bisa bertambah mahal. Maka diperlukan bantuan dari provinsi dan juga pemerintah pusat karna dilihat dari anggaran kita yang tidak mencukupi.” (pada hari Rabu 3 Oktober 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Maka dapat dilihat bahwa pengaman pantai yang dibangun dengan tujuan yaitu kualitas yang baik dan bermutu, dalam kenyataannya peneliti menemukan adanya masalah di pembangunan turap yang ada di pantai muntai ini karena bangunan turap yang dibangun dikawasan pos tni angkatan laut yang berada dipantai muntai ini yang dibangun sekitar 7 tahun yang lalu sudah hancur diterjang ombak, sehingga diperlukan pengawasan dan perawatan terhadap pembangunan turap supaya hal ini tidak terjadi lagi karena dampak yang ditimbulkan adalah kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah sendiri yang menyiapkan anggaran kembali untuk membangun ulang lagi turap tersebut.

j. melaksanakan kordinasi dan konsultasi dengan instansi atau dinas terkait dan dengan lembaga lainnya dalam rangka pembangunan sarana pengaairan, dalam melakukan pembangunan turap dalam mengatsi abrasi ini, dinas pekerjaan umum melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu pihak yang menangani proyek pembangunan pengaman pantai tersebut dan dinas kehutanan untuk penanaman tumbuhan yang bisa membantu mencegah abrasi ini.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sumberdaya air tentang langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk melakukan

pekerjaan yang apa bila terjadi penyimpangan agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.

Maka apa bila memang terjadi kelalaian atau kesalahan akan segera dilakukan tindakan perbaikan bertahap dalam melakukan tindakan perbaikan ini yaitu memberikan sanksi atau teguran, dan menambah jumlah pengawasan.

k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi sungai dan danau berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan.

Selanjutnya laporan yang terkait dengan peroses pembangunan fisik apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunannya, dan petugas pengawas jika melakukan pengawasan harus mengadakan laporan rutin agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan yang telah ditetapkan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan apabila ada kerusakan bisa langsung ditangani agar tidak semakin rusak.

l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dalam hal ini bisa diberikan apabila memang ada masalah yang harus diselesaikan dengan secepat mungkin.

Pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi abrasi supaya tidak meluas, pembangunan ini masuk kedalam program pembangunan pengamanan

pantai yang berisikan tentang pembangunan konstruksi batu pecah stepic/tanggul/dan turap sebagai penahan dan pemecah gelombang.

2. Perbaikan

Didalam seksi sungai pantai dan danau terjadi kekosongan sehingga wawancara dan informasi yang dimiliki terbatas, dalam hal ini untuk mengatasi abrasi diperlukan pengelolaan supaya suatu program bisa berjalan dengan dan pengelolaan dengan melibatkan peran masyarakat didalamnya. Usaha masyarakat setempat meletakkan batang pohon kelapa dipinggir lahan mereka untuk mengurangi dampak gelombang merupakan alternatif dari masyarakat itu sendiri mengingat abrasi yang terjadi sudah sangat parah karena sudah ratusan meter kebun warga yang amblas kelaut. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Maka diperlukannya pengelolaan dalam membantu masyarakat mengatasi masalah abrasi ini.

Tetapi dalam kenyataannya, didalam struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdapat beberapa kekosongan jabatan seperti di seksi sumber daya air dan beberapa lainnya bahkan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ini dijabat oleh PLT hal ini disebabkan seringnya pejabat dilingkungan) beliau mengatakan :

Wawancara dengan Ibu Tuti Hasnah (Warga Desa Muntai)

“ kami meminta perhatian yang serius ke desa muntai kami ini terutama didaerah pinggir pantai muntai ini, kami yang tinggal dekat tepi pantai disini sangat susah dengan air bersih akibat jarak rumah kelaut yang begitu dekat

akibat abrasi, dan juga masih cemas juga untuk tinggal disini karena kalau musim utara gelombang sangat besar dan kuat.” (hari sabtu 6 Oktober 2018 dirumah narsumber pinggiran pantai Muntai, 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara penelitian dengan salah satu masyarakat yaitu ibukuti asnah ini yang keberadaan rumahnya sekitar lebih kurang 50 meter dari bibir pantai yang terkena abrasi ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat dalam sebuah perencanaan dari setiap tugas dan fungsi yang dimiliki pemerintah dimana melakukan tinjauan langsung kelapaangan namun masalah ini masih belum bisa teratasi seharusnya pemerintahkan masyarakat yang merasakan dampak langsung dari abrasi ini sehingga perencanaan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang sumberdaya air ini tidak hanya dengan melakukan pembangunan pengamanan pantai saja tetapi juga usaha lain untuk melindungi masyarakat.

Dan selanjutnya :

Hasil wawancara peneliti dengan bapak wisnu (ketua RT 03 RW 02) beliau mengatakan:

“ didesa kami ini memang sudah banyak beberapa rumah dan ratusan meter tanah dan kebun warga yang amblas kelaut, kalau untuk pindah, sudah banyak warga yang pindah , itupun bagi mereka yang punya tanah selain di tepian pantai ini dan bagi mereka yang tidak punya tanah lain mereka tetap bertahan tinggal disitu, maka dari itu pemerintah harus segera memberikan bangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terimbas dari abrasi ini, saya

dan masrakat serta perangkat desa sudah berupa melakukan upaya penanaman bakau namun arus gelombang yang kuat tersebut sering gagal, kemarin kami juga melakukan penanaman dengan dinas kehutanan penanaman 1000 pohon tetapi ya masih tetap belum berhasil dan dirasa kurangnya perhatian kembali dari dinas lingkungan hidup.”

(Hari sabtu 6 Oktober 2018 didesa muntai)

Maka dapat disimpulkan bahwa, sudah ada gerakan inisiatif warga dalam melakukan pencegahan abrasi juga keaktifan dari dinas kehutanan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat maka dari itu, diperlukannya usaha dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ini untuk melakukan program rumah layak huni bagi masyarakat yang menerima dampak dari abrasi ini. Kemudian dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut :

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Roseina Arif,ST (Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air)

“ untuk masyarakat yang terkena dampak abrasi ini kami mempunyai program rumah layak huni yang mana program rumah layak huni yang mana program ini tidak bisa diberikan kepada secara keseluruhan mengingat yang merasakan dampak abrasi sudah lumayan banyak.”(hari rabu 3 oktober 2018 dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkalis pukul 09:00 WIB)

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa kepala keluarga yang masih bertahan di rumahnya yang sudah hampir terkena abrasi akrena belum mendapatkan bantuan dari pemerintah akan rumah layak huni tersebut.

3. Pencegahan

Seksi Sungai pantai dan danau juga memiliki tugas pengendalian yaitu menyiapkan bimbingan, pedoman dan kebijakan sertapetunjuk teknnis dibidang Seksi sungai pantai dan danau menegnai penegendalian bencana yang meliputi sungai pantai dan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Sungai Pantai dan Danau seputar program Pengendalian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perencanaan ini dilakukan dengan menunjuk staf yang diberikan tugas untuk mendapatkan informasi dan data yang akuraat unruk mengatasi masalah yang ada sehingga mendapatkan informasi dan data yanga kurat untuk mengatasi masalah yanga da sehingga dapat diselesaikan dengan semkasimal mungkin sehingga maslah kedepannya bisa diantisipasi.

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Suangai,Pantai dan danau.

Hal ini bertujuan agar didalam melaksanakan kegiatan dan melakukan perencanaan hingga pengevaluasian sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum.

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemastikan dan mengelola data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas

Seksi Sungai Pantai dan danau sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

Hal ini dimana program pengendalian ini bertujuan untuk meminimalisir masalah yang ada, didalam pengendalian masalah abrasi ini, pengendalian sangat diperlukan mengingat dari tahun ke tahun wilayah pesisir kabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama yang berhadapan langsung dengan selat malaka yang memiliki karakteristik gelombang laut yang cukup kuat.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Ririn Ayu Putri,SE (Staf Bidang Sumber Daya Air) beliau mengatakn:

“untuk program pengendalian ini, yaitu pengendalian masalah abrasi ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan Seksi Perencanaan dan mengawasi pembangunan” (hari rabu 18 oktober 2018 dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Maka dapat dilihat bahwa dilakukan pengawasan terhadap kinerja dinas dalam melaksanakan program yang ada apakah sudah berhasil atau malah sebaliknya, juga ada kerja sama yang dilakukan oleh masing-masing seksi dalam Bidang Sumber Daya Air untuk mewujudkan pembangunan dalam mengatasi abrasi.

- d. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Sungai Pantai dan Danau serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.

Untuk itu dalam hal ini dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air untuk mengatasi masalah dengan mengumpulkan data yang ada kemudian dianalisis untuk diajukan didalam proposal bidang Sumber Daya Air dalam bentuk masalah pengendalian.

- e. Menyiakan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Sumber Daya Air. Sehingga adapun tujuan hal ini yaitu bertujuan agar kebijakan yang dibuat lebih terarah.
- f. Mengumpulkan, mengklarifikasi, mengelola dan menganalisa data yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Sungai pantai dan Danau sebagai pedoman pemecahan masalah.

Untuk itu dilakukan dengan memulai sebuah program yang ada, kemudian dilakukan pembangunan didalamnya, selanjutnya bukan hanya dengan melakukan penanaman pohon saja, tetapi juga perlu adanya pengendalian terhadap masyarakatnya diakarenakan abrasi yang terjadi bukan hanya merusak alam tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di tepi pantai.

- g. Memantau pelaksanaan program kegiatan unit kerja melalui rapat dan laporan tertulis serta meninjau lapangan dalam Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui permasalahan dan perkembangannya.
- h. Menilai dan menelaah pelaksanaan pengendalian sarana pengairan untuk diajukan keada atasan apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan peroyek pembangunan fisik dalam pengendalian.

- i. Petugas pengawasan jika melakukan pengawasan harus mengadakan pelaporan rutin agar pengerjaan proyek pembangunan tidak jauh dari standar pelaksanaan proyek pembangunan, kemudian penilaian mengenai kualitas pengerjaan proyek pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta pengawas terkait, turun langsung untuk mendapatkan hasil yang baik maka ada pengendalian yang baik untuk mengawasi setiap kinerja dinas berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis maupun dalam pengerjaan proyek yang ada.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan sangat dibutuhkan didalam sosialisasi kemasyarakatan mengingat abrasi semakin meluas dan terjadinya penebangan hutan bakau secara ilegal, sehingga terjadinya ketidak seimbangan ekosistem disaerah antai yang terkena abrasi.

Hasil wawancara eneliti denag bapak Rico Amri,ST (Staf Seksi Sungai Pantai dan Danau)

“program pemeliharaan bangunan pengaman pantai sebenarnya sudah termasuk dalam program kami, tetapi masalahnya tetap sama masih tentang anggaran dan juga sumber daya manusiannya dan juga jarak dan kondisi jalan menuju kedesa muntai juga termauk susah karena jalan disana rusak berat.tetapi kami terus berupaya selalu memantau kondisi dilapangan”. (hari rabu 6 oktober 2018 dikantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rico tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dalam melakukan pemeliharaan bangunan pengaman pantai sudah berupaya untuk melakukan pemeliharaan tetapi terkendala oleh Anggaran yang minim sehingga banyak bangunan pengaman Pantai yang telah dibangun menjadi rusak kembali.

C. Faktor Penghambat Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengatasi Abrasi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Abrasi di Pantai Muntai adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Indikator Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dinas tidak memiliki data tentang berapa panjang garis pantai yang mengalami kerusakan sehingga belum adanya target atau rancangan berapa panjang bangunan pengaman pantai yang harus dibangun. Dan juga dari segi anggaran merupakan faktor utama yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Untuk Melakukan Pembangunan Pengaman Pantai Di Pantai Muntai ini dilihat dari biaya pembangunannya yang cukup besar.

- b. Berdasarkan Indikator Perbaikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis memiliki hambatan yakni juga berdasarkan anggaran yang minim sehingga seringkali bangunan pegaman pantai yang sudah ada kembali hancur karena tidak adanya anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap bangunan tersebut. Dan juga dirasa kurangnya pengawasan terhadap bangunan yang sudah ada sehingga seringkali terlambat untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap bangunan yang telah mengalami kerusakan.
- c. Berdasarkan Indikator Pencegahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis merupakan faktor penghambat yang paling utama dilihat dari keterangan warga yang mengatakan jaranganya petugas yang datang kewilayah mereka untuk melihat kondisi kerusakan yang ada, dan juga dirasa kurangnya kordinasi kepada instansi lain seperti dinas kehutanan untuk melakukan menanam pohon mangrove untuk mencegah meluasnya abrasi ini.
- d. Berdasarkan Indikator Pemeliharaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bengkalis dirasa kurang mengawasi bangunan yang ada sehingga bangunan yang telah dibangun menjadi rusak kembali hal ini sangat merugikan, karena anggaran yang seharusnya bisa diperuntukan lanjutan pembangunan menjadi harus untuk mengulang pembangunan kembali ditempat yang sama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi abrasi di Pantai Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yakni :

1. Berdasarkan indikator Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sudah pernah Melakukan Pembangun Pengaman Pantai dipantai Muntai Ini yakni bangunan turap tetapi karena kurangnya pengawasan serta anggaran Bangunan turap ini kembali hancur, dan juga dilihat dari anggaran yang tidak jelas dan seringkali masalah abrasi ini tidak menjadi prioritas Pemerintah kabupaten Bengkalis sehingga lanjutan proyek Pembanguna Pengaman Pantai ini sangat lamban bisa hingga bertahun tahun huingga belasan tahun baru kembali adanya lanjutan pembangunan pengaman pantai. Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Juga Sudah melakukan Pembangun Rumah Layak Huni bagi beberapa masyarakat yang rumahnya terkena dampak Abarsi ini.
2. Berdasarkan Indikator Perbaikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sangat jarang datang untuk meliht kondisi bangunan yang ada dan juga anggaran yang tidak mencukupi untuk

melakukan perbaikan sehingga sering kali bangunan yang sudah ada menjadi rusak kembali tidak sempat untuk dilakukan tindakan perbaikan.

3. Berdasarkan Indikator Pencegahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis juga dirasa belum optimal dalam menjalankan tugasnya dalam hal pencegahan, kurangnya pengawasan terhadap wilayah serta bangunan yang ada sering kali membuat bangunan yang ada cepat hancur kembali karena ganasnya ombak serta tidak adanya perbaikan terhadap kerusakan bangunan pengaman pantai tersebut. Dan juga dilihat belum melakukan kordinasi terhadap instansi lain untuk mencegah meluasnya abrasi ini.
4. Berdasarkan indikator pemeliharaan, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupate Bengkalis dirasa kurag optimal dalam menjalankan tugasnya tersebut, dilihat dari tidak adanya perbaikan terhadap bangunan yang sudah ada sehingga bangunan menjadi rusak kembali.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten bengkalis dalam mengatasi abrasi peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Diharapkan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan kajian tentang luasnya abrasi sehingga mendapatkan data yang akurat berkaitan tentang luas panjang abrasi sehingga memudahkan dalam mengatasi abrasi ini saat ingin melakukan pembanguna pengaman pantai, dan juga diharapkan masalah abrasi ini termasuk menjadi prioritas

pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dapat Memasukan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Setiap tahunnya dan juga mengoptimalkan anggaran di bidang pembangunan pengaman pantai ini.

2. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air untuk sennatiasa Menugaskan Anggotanya unuk Sering Melakukan pengawasan Kewilayah ini sehingga bisa tau bagaimana kondisi bangunan dan kondisi pantai secepatnya. Sehingga bila terjadi kerusakan terhadap bangunan pengaman pantai dapat dilakukan segera tindakan perbaikan sebelum kerusakannya menjadi lebih parah, dan juga diharapkan dinas menyihkan anggran juga dalam hal perbaikan dan perawatan banguna pengaman pantai.
3. Dalam hal pencegahan diharapkan staf atau anggota dari dinas pekerjaan umum dan penartaan ruang Kabupaten Bengkalis Untuk dapat insentiv melakukan pengecekan dilapangan sehingga dapat dilaporkan selalu kondisi dilapangan. Dan juga diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar dapat berkodinasi kepada instansi lain contohnya dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup serta dinas lainnya yang juga memiliki tanggung jawab terhadap masalah abrasi ini sehingga dapat melakukan upaya upaya untuk mencegah abrasi menjadi lebih parah lagi seperti melakukan penanaman mangrove besar besaran dna juga sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya abrasi.

4. Dalam hal pemeliharaan Diharapkan kepada dinas pekerjaan umum dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air untuk senantiasa melakukan pengamatan dilapangan sehingga keadaan bangun pantai yang sudah ada dapat terca dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam dan wijaya mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*, Pekanbaru: Alaf Riau
- B. Triatmodjo, 1999, *Teknik Pantai*, Yogyakarta: Beta Offiset
- Kodotie, Robert J & Roesstam sjarif 2010. *Tata ruang air*. PT Andi Aakin
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nadraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Pemerintahan baru I)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nadraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru II)*. Jakarta: PTRineka Cipta
- Nadraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PTRineka Cipta
- N.Dunn. Wiliam, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada Universitas, Yogyakarta
- Noor, Juliansyah.. 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soeryono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Hajimangung
- Soehardono, 2004, *Perlakuan Masyarakat Modern*, Jakarta: Elexmedia
- Soharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik "Panduaan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan sosial"*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksana
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu pemerintahan*. Bandung: Mandar maju
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

- Sumaryadi, I Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukarna.2011. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Supardi, 1994, *Pembangunan yang memanfaatkan Sumber Daya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tjokromidjojo, Bintaro, 1995, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Usman,Akbar.2011.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta. Perasati Pustaka.
- Rachman,Maman.1999.*Strategi dan langkah-langkah Penelitian*.Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Raho, Bernad. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Widjaja,Haw.2011.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakart.Grafindo Persada.
- Winarno, Budi; 2014; *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*; Yogyakarta: *Center of Academic Publishing Service (CAPS)*.
- Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR

Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselohening, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
- Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Tentang Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Wilayah Kecamatan Bantan.
- Data luas wilayah dan jumlah penduduk Bengkalis dalam angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2017